

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Wilayah pesisir Jakarta Utara terancam tenggelam pada 2050, salah satu penyebab terancamnya Jakarta akan tenggelam adalah naiknya permukaan air laut. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kenaikan muka air laut disebabkan melelehnya es di tiga wilayah utama di dunia, yaitu di Kutub Selatan, yang kedua di Greenland, Denmark, dan ketiga lapisan es yang berada di pegunungan Himalaya (CNN Indonesia, 2021). Berdasarkan data yang dipublikasi oleh University of Hawaii Sea Level Center, kenaikan permukaan air laut dunia per Januari 2018 setinggi 3,9cm atau meningkat hampir dua kali lipat (Lokadata, 2018, Para. 1).

Selain disebabkan naiknya permukaan air laut, ancaman utama Jakarta akan tenggelam pada 2030 adalah akibat ekstraksi air tanah yang digunakan secara berlebihan, Menurut pemantauan Badan Geologi dengan menggunakan alat *geodetic* penurunan permukaan tanah di pesisir Jakarta mencapai 18,2cm/ tahun (ESDM, 2017, Para. 3).

Penyebab utama masyarakat di pesisir Jakarta Utara melakukan ekstraksi air dalam tanah karena sebagian besar wilayah pesisir Jakarta Utara belum terhubung dengan pipanisasi air bersih milik Perusahaan Air Minum (PAM) yang saat ini dikelola oleh PT Palyja dan PT Aetra, sehingga dalam mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di wilayah pesisir Jakarta Utara memanfaatkan air dari dalam

tanah. Menurut Badan Geologi eksploitasi air dari dalam tanah secara berlebihan berakibat pada laju penurunan permukaan tanah (ESDM, 2017, Para. 4)

Pemanfaatan air tanah secara berlebihan di wilayah pesisir Jakarta Utara selain berdampak terhadap penurunan permukaan tanah, air tanah di wilayah pesisir Jakarta Utara sudah tercemar dan memiliki dampak buruk bagi kesehatan, secara umum Cekungan Air Tanah (CAT) di pesisir Jakarta Utara air tanahnya mengandung Natrium (Na), Klorida (Cl), Total Dissolve Solid (TDS), dan Daya Hantar Listrik (DHL) yang tinggi akibat pengaruh intrusi air laut, jika digunakan secara terus menerus akan berpengaruh terhadap metabolisme di dalam tubuh manusia (ESDM, 2017, Para. 1).

Sudah lebih dari 20 tahun wilayah Muara Angke belum terhubung dengan pipanisasi air bersih milik Perusahaan Air Minum (PAM). Menurut Edi Sukardi selaku pendiri Kampung di pemukiman Muara Angke RW 22 menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga di wilayah Muara Angke membeli air secara pikulan dengan biaya persatu pikul air yang terdiri dari dua dirigen berkapasitas 40 liter seharga Rp Rp 5.000. Mayoritas warga di Muara Angke membutuhkan enam hingga tujuh pikul air dalam sehari dengan total biaya perhari hingga Rp 35.000, jika dikalikan dalam satu bulan warga di Muara Angke mengeluarkan biaya untuk membeli air mencapai Rp 1.000.000. Edi Sukardi menjelaskan karena harga air bersih yang dijual secara pikulan mahal, sehingga mayoritas warga melakukan ekstraksi air dari dalam tanah (Edi, Komunikasi Pribadi, 25 Maret 2022).

**Gambar 1.1 Pompa air untuk menyedot air dari dalam tanah di pemukiman Muara Angke**



Sumber: Dokumentasi pribadi

Solusi untuk mengatasi penurunan permukaan tanah dan mahalnya harga air bersih di wilayah pesisir Jakarta Utara adalah dengan pipanisasi air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Air Minum (PAM). Namun, saat ini pengelolaan pipanisasi air bersih di DKI Jakarta dinilai buruk secara kuantitas. Dilansir dari BBC News Indonesia (2019, Para. 11) Erna Rosalina anggota Komunitas Solidaritas Perempuan Jabodetabek telah melakukan survei di wilayah Rawa Badak, Jakarta Utara sejak 2010 bahwa air yang keluar dari pipa Perusahaan Air Minum (PAM) terkadang tidak mengalir setiap waktu sehingga warga terkadang harus berjaga sampai malam untuk menunggu air.

Pada Hari Air Sedunia 22 Maret 2022 Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, menyoroti terkait kebijakan pengelolaan air di Jakarta harus dibenahi. Suci Fitriah selaku Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta menjelaskan pemenuhan air bersih di Jakarta belum mampu menjamin ketersediaan air bersih yang murah, mudah diakses, dan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa masyarakat

Jakarta yang kesulitan mengakses air pipanisasi air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Walhi, 2022, Para. 1). Suci juga menjelaskan minimnya hak atas air tersebut tidak terlepas dari swastanisasi air, diskriminasi pemasangan pipa PAM, dan pengelolaan sumber daya air yang buruk (Walhi, 2022, Para. 2).

Dilansir dari Kumparan.com (Nagara, 2019, Para. 6) Hampir 25 tahun pengelolaan air di DKI Jakarta dikelola oleh pihak swasta yaitu PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) untuk wilayah barat dan juga PT. Aetra Air Jakarta (Aetra) untuk wilayah timur. Kedua perusahaan tersebut mengantongi izin hingga 2023.

Pada masa kontrak berlangsung PT Palyja dan PT Aetra belum dapat memenuhi hak atas air bersih bagi masyarakat di Jakarta. Berdasarkan catatan Pemprov DKI Jakarta yang dilansir dari CNN Indonesia (2019, Para. 12) menunjukkan pada 2017 pipanisasi air bersih di wilayah Jakarta baru menjangkau 59,4% masyarakat Jakarta, sementara pada 1998, jangkauan pipanisasi air bersih baru mencapai 44,5% masyarakat Jakarta. Ini artinya, selama 20 tahun terakhir, jumlah masyarakat yang terhubung dengan pipanisasi air bersih hanya bertambah 15%.

Pada 2023 PT Palyja dan PT Aetra resmi berakhir dalam mengelola pipanisasi air bersih di wilayah Jakarta, dan seluruh layanan pipanisasi air bersih akan dilakukan oleh pemerintah Jakarta melalui PAM Jaya sebagai bagian dari Pemda DKI Jakarta. Namun, PAM Jaya memiliki PR besar dalam memenuhi 100% layanan pipanisasi air bersih bagi masyarakat Jakarta khususnya masyarakat di pesisir Jakarta. Menurut LBH Jakarta (2021, Para 4) pengelolaan pipanisasi air bersih yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan kontrol dan pengawasan pada otoritas yang dipilih

masyarakat dan perwakilan dari pengguna air, yang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas air, serta tarif harga yang lebih murah.

Berdasarkan permasalahan sulitnya jangkauan pipanisasi air bersih bagi warga di pesisir Jakarta, dan didukung dengan harga air bersih yang mahal sehingga masyarakat melakukan ekstraksi air dari dalam tanah yang mengakibatkan penurunan permukaan tanah. Penulis akan membuat sebuah karya dalam bentuk video *indepth reporting* yang berjudul “Mahalnya Air Mengancam Jakarta Tenggelam”. Video ini menceritakan tentang sulitnya akses pipanisasi air bersih di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara, karena wilayah tersebut belum terhubung dengan pipanisasi air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM) sejak wilayah tersebut berdiri pada 1997. Masyarakat di Muara Angke untuk kebutuhan sehari-hari harus membeli air bersih yang dijual secara pikulan dengan harga relatif mahal, sehingga masyarakat di Muara Angke lebih memilih untuk menghemat dengan menggunakan air dari dalam tanah. Namun, berjalannya waktu penggunaan air dari dalam tanah di Muara Angke dimanfaatkan untuk dikomersilkan yang menyebabkan ekstraksi air dalam tanah tidak terkontrol dan dapat berpengaruh terhadap penurunan permukaan tanah. Video *indepth reporting* ini juga akan menceritakan tentang layanan pipanisasi air bersih yang buruk karena air yang dialirkan oleh PT Palyja sering terhenti hingga berminggu-minggu, salah satu wilayah di pesisir Jakarta yang sudah terhubung dengan pipanisasi air bersih milik PT Palyja adalah wilayah Muara Baru, Jakarta Utara. Di wilayah tersebut mayoritas warganya menjelaskan bahwa air yang dialirkan oleh PT Palyja tidak dapat mengalir setiap waktu, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk

membeli air bersih. Video *indepth reporting* ini menawarkan solusi agar layanan pipanisasi air bersih di wilayah Jakarta dikelola oleh pemerintah Jakarta melalui PAM Jaya karena layanan pipanisasi air bersih yang dikelola oleh negara dapat memberikan kontrol dan pengawasan pada otoritas yang dipilih masyarakat. Dan pengelolaan pipanisasi air bersih yang dikelola oleh negara dapat berfokus terhadap pemenuhan hak air bagi masyarakat dibandingkan mementingkan profit atau keuntungan.

Penulis akan membuat video *indepth reporting* berdurasi 40 menit, yang dapat disaksikan oleh semua kalangan mulai dari remaja hingga dewasa. Melalui dokumenter ini, penulis berharap masyarakat dapat mengambil nilai positif yang terkandung.

## **1.2 TUJUAN KARYA**

Pesisir Jakarta merupakan salah satu wilayah yang sulit dalam menjangkau pipanisasi air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM) sehingga mereka harus membeli air bersih yang dijual secara pikulan dengan harga relatif mahal. Namun, beberapa warga ada yang berinisiatif untuk menghemat pengeluaran dalam membeli air dengan cara melakukan ekstraksi air dari dalam tanah yang ternyata memiliki dampak buruk pada laju penurunan muka tanah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan membuat video *in-depth reporting* dengan topik mahalnya harga air bersih yang mengancam tenggelamnya Jakarta. Dalam proses pembuatan video *in-depth reporting* ini, peran utama penulis adalah sebagai produser yang bertugas pada beberapa tahap, yaitu menentukan topik dan konsep, melakukan observasi, dan menyusun naskah/narasi.

Selain itu, penulis juga berperan sebagai *videographer* dan reporter yang bertugas melakukan pengambilan gambar dan melakukan wawancara dengan narasumber. Dan juga, penulis berperan sebagai editor yang bertugas dalam melakukan *editing video* dan membuat materi promosi.

Video *indepth reporting* yang dibuat oleh penulis memiliki judul **Mahalnya Air Mengancam Jakarta Tenggelam** dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memproduksi video *in-depth reporting* mengenai permasalahan mahalnya air bersih dan turunnya permukaan tanah akibat ekstraksi air di pesisir Jakarta Utara.
2. Melalui video *in-depth reporting* ini diharap dapat menyadarkan publik akan dampak bahaya melakukan ekstraksi air yang menyebabkan turunnya permukaan tanah.
3. Video yang dibuat memiliki target ditonton lebih dari 100 orang.

### **1.3 KEGUNAAN KARYA**

Setelah video ini tercipta, penulis berharap bahwa video ini dapat berguna bagi masyarakat luas, dan juga karya ini berguna untuk:

1. Mendorong pemerintah untuk memberikan solusi mengenai mahalnya harga air bersih di wilayah pesisir Jakarta dan mendorong pemerintah untuk melarang ekstraksi air dalam tanah yang beresiko terhadap kerusakan lingkungan.

2. Mendorong PAM Jaya selaku badan usaha milik pemerintah Jakarta untuk mengawal proses transisi pengalihan pengelolaan air bersih di Jakarta dari pihak swasta, yaitu PT Palyja dan PT Aetra kepada PAM Jaya pada awal 2023.
3. Mendorong PAM Jaya selaku badan usaha milik pemerintah Jakarta untuk dapat memberikan layanan akses pipanisasi air bersih yang murah, mudah diakses, dan tidak terbatas.
4. Mendorong PAM Jaya untuk memprioritaskan layanan pipanisasi air bersih bagi masyarakat di wilayah pesisir Jakarta karena harga air bersih di wilayah tersebut relatif mahal dan membebani masyarakat di pesisir Jakarta.